

## ***Abstrak***

### ***IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA TAHAP PRA PENEMPATAN)***

***Oleh***

***Dhitania Hussella***

Lampung merupakan provinsi urutan ke empat dalam penempatan pekerja migran ke luar negeri. Dengan tingginya jumlah penempatan masih ditemui kasus-kasus PMI non-prosedural di Provinsi Lampung yang disebabkan oleh minimnya akses informasi serta pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penempatan PMI yang legal. Dengan permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bekerja sama dengan BP2MI untuk memperkuat perlindungan dan pengawasan penempatan PMI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi dari kebijakan perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung serta menjelaskan tantang dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu secara substantif kebijakan perlindungan PMI telah dikategorikan dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun daerah. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur resmi, terbatasnya sumber daya pelaksana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas pelaksana sebagai strategi untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap calon pekerja migran. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan perlindungan PMI yang lebih efektif dan berkelanjutan

***Kata Kunci*** : *Implementasi Kebijakan, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan, Pra-Penempatan, Provinsi Lampung*

## ***Abstract***

### ***IMPLEMENTATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION POLICY IN LAMPUNG PROVINCE (STUDY AT PRE-PLACEMENT STAGE)***

***By***

***Dhitania Hussella***

Lampung is the fourth province in the placement of migrant workers abroad. With the high number of placements, there are still cases of non-procedural PMI in Lampung Province caused by minimal access to information and public understanding of the legal PMI placement mechanism. With these problems, the Lampung Provincial Manpower Office is working with BP2MI to strengthen the protection and supervision of PMI placement. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the migrant worker protection policy in Lampung Province and to explain the challenges and opportunities in implementing the policy. The results of this study are that substantively the PMI protection policy has been categorized in various regulations, both national and regional. However, at the implementation level, various obstacles are still found, such as low public understanding of official procedures, limited implementing resources, and weak coordination between related institutions. This study recommends increasing socialization, strengthening cross-sector coordination, utilizing information technology, and strengthening the capacity of implementers as strategies to optimize protection for prospective migrant workers. These findings are expected to be input for the Lampung Provincial Manpower Office in formulating a more effective and sustainable PMI protection policy

***Keywords:*** *Policy Implementation, Indonesian Migrant Workers Protection, Pre-Placement, Lampung Province*